

## Kerjasama Industri Pertahanan melalui Pengadaan Jet *Rafale* untuk memperkuat Pertahanan Indonesia

Supono Hariyanto, Agus Salim, Endah Palupi

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut  
Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230  
[suponohariyanto60@gmail.com](mailto:suponohariyanto60@gmail.com)

**Abstrak** — Alutsista yang mumpuni harus dimiliki oleh suatu negara sebagai alat pelindung negara baik dari ancaman dalam maupun dari luar negeri. Melalui alutsista, national branding suatu negara kepada negara lain digunakan untuk menunjukkan pownya. Untuk itu, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dalam bidang pertahanan, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan. Indonesia membutuhkan pesawat jet tempur untuk meremajakan alutsista yang menua dalam rangka melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Keputusan memilih jet tempur Rafale produksi Prancis telah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan dari para stakeholder. Hal tersebut selaras dengan Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) Model Aktor Nasional yang dikemukakan oleh Graham T. Allison yang digunakan untuk menganalisis kerjasama Indonesia dan Prancis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode ini menerapkan pada penelitian sumber tertulis atau studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana penelusuran data-data bersumber dari bahan-bahan tulisan literatur seperti buku, dokumen-dokumen, media massa yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kedua negara sepakat untuk saling meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, hal ini dapat dilihat dengan saling mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, dan pengembangan produksi bersama alat-alat sistem pertahanan antara kedua negara.

**Kata Kunci:** Industri Pertahanan, Kerjasama, Industri Pertahanan, Rafale

**Abstract** — *The state must have qualified defence equipment as a means of protecting the state, against both threats that come from within and from outside the country. Through defence equipment, the national branding of a country to other countries is used to show its power. For this reason, this study was written to know how the cooperative relationship between Indonesia and France is in the defence sector and how the steps taken by the two countries in increasing cooperation in the defence industry are. Indonesia needs fighter jets to rejuvenate its ageing defence equipment to protect and maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. The decision to choose the Rafale fighter jet produced by France has been through various considerations and calculations from stakeholders. This is in line with the National Actor Model Decision Making Theory proposed by Graham T. Allison, which analyses the cooperation between Indonesia and France. The method used in this research is descriptive analysis. This method applies to research written sources or literature studies. The data collection technique used is literature study, where the search for data comes from literary writing materials such as books, documents, and mass media related to the problem. The results obtained from this study are that the two countries agreed to mutually enhance cooperation in the defence sector, this can be seen by encouraging the transfer of technology and knowledge, and the development of joint production of defence system tools between the two countries.*

**Keywords** — *Defense Industry, Cooperation, Fighter Jets, Rafale.*

### I. PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Prancis sudah terjalin sejak awal abad ke-19 pada masa kolonial Hindia Belanda. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan telah terjalin sejak September tahun 1950. Hubungan bilateral yang cenderung harmonis ini terjalin antara lain dikarenakan terdapat kesamaan antara prinsip kebijakan dan politik luar negeri yang dianut

oleh Indonesia dan Prancis. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sedangkan Prancis menyebutnya sebagai *Politique Independence* Prancis. Prinsip tersebut menjadi landasan terjalinnya hubungan bilateral yang baik antar negara tersebut (Kemenlu, 2018). Kunjungan pertama Presiden Prancis François Mitterrand ke Indonesia pada tanggal 16 September 1986 menyepakati perjanjian kerjasama dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia-Prancis (IFCCI) yang telah resmi dibuka dengan tujuan

untuk mengumpulkan kelompok bisnis Prancis dan Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungan secara profesional antar kedua negara (Firman, 2017). Kebijakan Pembangunan industri pertahanan diarahkan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing yang dapat mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Industri pertahanan mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga jika berbicara mengenai kemandirian bagi pertahanan Indonesia, di dalamnya juga harus mencakup kemandirian industri pertahanan. Kemandirian pada industri pertahanan mengandung arti bahwa industri pertahanan di dalam negeri harus mampu memproduksi, memelihara, mengoperasikan dan bebas dari embargo dan dikte dari negara lain. Pada sidang komite kebijakan industri pertahanan tahun 2014 Presiden Joko Widodo mengatakan empat kebijakan prioritas dalam bidang pertahanan. Salah satu kebijakannya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista (Armenia, 2014)

Alutsista yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pesawat tempur guna menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Pembelian pertama jet tempur dari Prancis dilakukan Indonesia di tengah upaya merombak kekuatan alutsista udara yang menua - mencakup jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dan Su-27, Su-30 Sukhoi buatan Rusia. (BBC News, 2022)

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengambil keputusan yang tepat terkait bidang teknologi dan industri yang mendukung industri pertahanan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari studi pustaka dan bahan pustaka yang tersedia, media massa, media elektronik, buku elektronik, dan sumber terbuka lainnya..

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuatan keputusan negara (*decision maker*) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi kepentingan nasional.

Graham T. Allison menyebutkan bahwa ada tiga model dari proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu, Model Aktor Rasional (*rational actor model*), Model Proses Organisasi (*organizational process model*), dan Model Politik Birokratik (*governmental politics/bureaucratic politics model*) (Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, 2008)

**Model Aktor Rasional** menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif / opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional / intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

**Model Proses Organisasi** menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

**Model Politik Birokratik** menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar *stakeholders* terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.

Model aktor rasional berakar dari perspektif realisme yang dipopulerkan oleh Morgenthau. Model ini memiliki asumsi bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam politik dunia. Negara-negara mempunyai tujuan yang jelas untuk memutuskan pilihan mana yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aktor rasional berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional. Mereka kemudian akan berkompromi, berkoalisi, dan berkompetisi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menghitung *cost and benefit* dari setiap pilihan yang ada untuk menilai mana pilihan terbaik dengan *cost* terendah untuk mencapai tujuan. Dari hal tersebut, kemudian akan menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Model ini mempunyai prinsip "*maximize their gains, minimize their losses*". Aktor selalu berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional.

Teori aktor rasional digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya. Teori aktor rasional berasumsi bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi. Demikian juga

dengan Indonesia dalam menentukan kebijakannya membeli pesawat tempur Rafale dari Prancis. Indonesia dihadapkan kepada beberapa pilihan untuk membuat keputusan.

#### **A. Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Tahap-Pengadaan Alutsista**

Kebijakan pertahanan mengalami perubahan pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna menyempurnakan perkembangan di lingkungan strategis baik di tataran nasional maupun internasional. Kebijakan yang digunakan Indonesia untuk bidang pertahanan disebut dengan kebijakan MEF (Minimum Essential Force) atau Kekuatan Pokok Minimum yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi obyek-obyek dari pertahanan negara. Kebijakan ini merupakan sebuah reformasi atas kebijakan pertahanan yang sudah ada dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (Pertahanan, 2012).

Kebijakan MEF yang dilaksanakan pada tiga matra terpadu (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF yaitu, rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Dengan kebijakan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum ini kemudian menciptakan sebuah perubahan signifikan dalam lingkungan pertahanan Indonesia. Perubahan signifikan tersebut meliputi modernisasi alutsista yang sudah tidak layak untuk dioperasikan. Pemeliharaan alutsista akan berpengaruh besar apabila Indonesia tiba-tiba mendapat ancaman keamanan. Kebijakan MEF juga mendorong Industri Pertahanan domestik untuk semakin produktif dan melakukan kerja sama dengan Industri Pertahanan negara-negara lain. Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang dimana akan diluncurkan selama 15 tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2024 mendatang sehingga akan tetap menjadi fokus pemerintah kepemimpinan selanjutnya.

Pengadaan alutsista TNI adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persenjataan melalui berbagai proses dari perencanaan sampai akhirnya alutsista tersebut diterima oleh TNI untuk digunakan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam bidang pertahanan. Setiap tahunnya, pemerintah selalu berupaya untuk menata sistem pengadaan alutsista dengan mengeluarkan kebijakan satu pintu (indomiliter, 2014)

Kebijakan pengadaan alutsista bagi TNI dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan sebagai otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan ini mengharuskan

pengadaan alutsista TNI mengikuti mekanisme yang ditetapkan yaitu melalui Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan akan menunjuk perusahaan konsorsium atau pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pengadaan alutsista. Kebijakan sistem pengadaan alutsista satu pintu merupakan hal yang penting agar pemerintah mengetahui dengan jelas dari siapa dan untuk siapa alutsista itu diadakan. Kementerian Pertahanan akan mendapatkan permintaan dari TNI mengenai alutsista apa saja yang harus dimodernisasi.

#### **B. Akuisisi Pengadaan Alpalhankam**

Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Istana Bogor pada 13 April 2021 membahas tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Paradigma belanja bidang pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional. Karena itu, dalam setiap pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri harus mensyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset dan transfer teknologi. Juga harus ada kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam. Strategi yang dilakukan yaitu kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri, dan semua *procurement*/akuisisi Alpalhankam yang berasal dari luar negeri harus dibangun di Indonesia untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, Perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) jangka Panjang, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan.

#### **C. Latar Belakang Kesepakatan Dengan Prancis**

Hubungan Indonesia dengan Prancis tidak banyak mengalami pasang surut, di mana Prancis telah lama menjadi pengguna beberapa jenis alutsista, terutama untuk produksi tank. Di antaranya adalah tank ringan AMX 13, yang dirancang oleh *Atelier de Construction d'Issy les Moulinaux* (AMX) dan diproduksi oleh *Groupement des Industries de l'Armée de Terre* (GIAT Industries). Pada tahun 1968, Indonesia juga membeli tank AMX 10 untuk memperkuat Korps Marinir TNI AL. TNI AL juga telah mengoperasikan tiga kapal penelitian buatan Prancis, salah satunya Baruna Jaya 2. Dalam misi perdamaian di bawah bendera Dewan Keamanan PBB di Lebanon, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengoperasikan kendaraan lapis baja buatan Prancis, *Vehicule L'Avant Blinde* (VAB) 4x4, produksi Renault Truck Prancis. Dengan Prancis menjadi bagian dari NATO dan salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, kristalisasi kerjasama dengan Prancis tentunya akan

mempengaruhi diplomasi internasional Indonesia yang menganut prinsip gerakan nonblok. Prancis tentu melihat Indonesia sebagai teman di arena politik global.

Kesepakatan dengan Indonesia diteken saat Prancis berusaha mempererat hubungannya dengan negara-negara di Indo-Pasifik, setelah Australia, Inggris, dan AS membentuk aliansi strategis baru bernama AUKUS tahun lalu untuk mengontor pengaruh Cina yang menggurita. Pakta yang mencakup pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, membuat Prancis merasa tersisihkan. Padahal sebelumnya Paris sudah meneken kontrak pembelian kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Canberra yang berujung dengan batalnya kesepakatan. Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly dalam kunjungannya ke Indonesia 10 Februari 2022, berpendapat bahwa kemitraan strategis akan meningkatkan hubungan pertahanan antar kedua negara. Prancis bangga berkontribusi untuk memodernisasi angkatan bersenjata dari mitra (Indonesia), yang memainkan peran kunci di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. Sebaliknya dengan hal pembatalan kesepakatan pertahanan akan ada konsekuensi dan risiko berupa kemungkinan merenggangnya hubungan pertahanan. Parly juga mengatakan Indonesia adalah negara kedua di kawasan Pasifik setelah India yang membeli jet dari Dassault Aviation.

Bagi Indonesia, memperkuat sistem pertahanan akan dapat meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan (LCS). Naik turunnya eskalasi konflik kepentingan nasional beberapa negara pengeklaim LCS, membuat Indonesia berpikir untuk menghadirkan alutsista baru yang membuat Indonesia bisa lebih diperhitungkan dan mampu memberikan tekanan-tekanan terhadap negara lain dalam konteks politik kawasan.

#### D. Penentuan memilih Rafale

Indonesia memiliki target mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menandatangani kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur generasi 4,5, Dassault Rafale, buatan Prancis. Kesepakatan ini merupakan langkah terbaru Kemhan dalam meremajakan alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia. Pembelian 6 jenis *multirole combat aircraft* ini akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Sehingga total menjadi 42 unit. (Berry, 2022)

Selain sepakat untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale, Indonesia juga menandatangani berbagai kerja sama dengan Prancis dalam kesepakatan bernilai Rp8,1 miliar dolar atau setara Rp116,2 triliun. Kerja sama itu termasuk

pengembangan kapal selam sampai komunikasi. Secara rinci, kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan kapal selam akan terjalin antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerja sama Program Offset dan ToT antara Dassault dan PT DI untuk *maintenance, repair, dan overhaul* pesawat-pesawat Prancis di Indonesia, seperti Rafale, Helikopter Caracal, dan lainnya. MoU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group, dan kerja sama antara PT Pindad dan Nexter Munition untuk pembuatan munisi kaliber besar *manufacturing* amunisi guna keperluan persenjataan darat (BBC News, 2022).

Pertimbangan pemerintah memilih Rafale untuk memperkuat TNI dan kerja sama bidang pertahanan dengan Prancis antara lain:

##### 1) Keunggulan Jet Tempur Rafale

Rafale diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Rafale memiliki mesin kembar yang dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi atau *omnirole*. Rafale dibekali dengan beragam sistem persenjataan, antara lain:

- a) Rudal serangan udara-ke-udara MICA dan METEOR
- b) Rudal serangan udara-ke-darat HAMMER
- c) Rudal anti kapal permukaan AM39 EXOCET
- d) Bom berpemandu laser
- e) Meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2500 putaran per menit.

Jet tempur ini juga mampu menampung senjata hingga sembilan ton. Kecepatan maksimalnya mencapai 1.384 kilometer per jam. Dengan kemampuan untuk membawa banyak jenis senjata dan sistem misi yang canggih, Rafale disebut dapat melakukan serangan udara-ke-darat, serta serangan udara-ke-udara dan pengecatan pesawat musuh dalam satu misi. (M. Herindra, 2022)

##### 2) Investasi Jangka Panjang Alutsista Indonesia

Kedatangan Rafale membawa tantangan baru bagi TNI karena sistem pada pesawat Rafale tidak sama dengan pesawat buatan Rusia atau Amerika yang sudah terlebih dulu digunakan TNI. Indonesia harus memulai dari nol dalam hal pemeliharaannya. Para pilot dan teknisi wajib dididik dari awal, demikian halnya dengan laboratorium pemeliharaan untuk mengkalibrasi peralatan-peralatan elektronik yang super canggih (Basri, 2022). Maka sudah seharusnya diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang

merupakan konsekuensi besar bagi Indonesia ketika memutuskan membeli jenis jet tempur buatan Prancis untuk pertama kalinya.

Pengamat pertahanan dan alutsista, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyatakan, jet tempur hanyalah satu bagian dalam sistem pertahanan udara. Meskipun canggih, kemampuannya tetap akan tergantung pada sistem pertahanan udara - radar, pangkalan, *command and control*, dan sebagainya. Desain pertahanan udara harus merupakan ekosistem yang memadukan secara tepat derajat kekuatan pertahanan udara, termasuk infrastruktur pangkalan udara, sistem radar, dan sebagainya. Penyertaan transfer teknologi dalam pembelian Rafale sesuai amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Transfer teknologi menjadi salah satu cara mewujudkan visi Presiden dalam rangka mengubah belanja sektor pertahanan menjadi investasi jangka panjang.

### 3) Pengembangan Kerja Sama Industri Pertahanan

Kementerian Pertahanan dan Prancis juga telah merancang strategi yang menggabungkan tiga instrumen inti dalam tingkat kekuatan: perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia, sebagai bagian dari kerja sama. Rancang bangun strategis yang telah dirumuskan Kemhan antara lain penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di bidang pertahanan dengan mitra Prancisnya (Yuniar, 2021).

Pembelian pesawat tempur dari negara Prancis sebagai produsen akan memberi dampak pada penerapan dan skema operasional peralatan pendukung darat, laboratorium kalibrasi, serta taktik dan strategi yang spesifik untuk setiap pesawat. Pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung ekosistem menjadi modal dasar karena dibutuhkan untuk membidangi pengendalian, pemeliharaan dan sistem pendukung dasar secara umum. Hal tersebut berarti kerja sama pertahanan dengan Prancis akan berdampak besar pada skema pendidikan dan pelatihan personel TNI yang menangani pemeliharaan jet Rafale. Skema ini dapat dikatakan sebagai bagian dari mekanisme *offset* yang disepakati dengan Prancis. Target mekanisme *offset* ini untuk menghasilkan lebih banyak jumlah teknisi dan instruktur yang memahami *platform* jet tempur seperti Rafale. Kementerian Pertahanan berharap kerjasama strategis di bidang pertahanan dengan Prancis akan membuka peluang baru bagi Indonesia

dalam pengembangan sistem rudal dan radar anti udara.

### 4) Efisiensi anggaran

Aspek efisiensi anggaran dapat dinilai bahwa pembelian alutsista dinilai tepat dikarenakan penawaran harga yang rasional. Selain itu sudah dilaksanakan diplomasi pertahanan dari tim Kemhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo.

### 5) Aspek Strategi Pertahanan dan Politik

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak mengikat diri secara apriori pada kekuatan dunia manapun. (Sidebang, 2022). Namun di tengah keterbatasan alutsista dan anggaran bidang pertahanan negara Indonesia, pembelian pesawat tempur saat ini dinilai tepat karena dilakukan ketika Indonesia sedang berusaha memperkuat postur pertahanannya demi meningkatkan posisi tawar di kawasan Asia Pasifik. Pengadaan pesawat tempur ini merupakan subsistem pertahanan udara, subsistem dari sistem pertahanan negara.

Prancis adalah negara yang memiliki kemandirian dalam hal produksi alutsista. Prancis bersedia bekerja sama dalam skema *offset* (timbang balik dagang dalam pembuatan spare part pesawat atau kerjasama lainnya). Tentu saja hal tersebut membawa dampak positif bagi perkembangan alutsista Indonesia. Terlebih Prancis walaupun anggota NATO, tapi politik luar negeri Prancis netral dalam isu-isu sensitif seperti menolak invasi AS di Irak. (Alam, 2022)

### 6) Jaminan Bebas dari Sanksi CAATSA

Adanya spekulasi bahwa pembelian Rafale dari Prancis dinilai aman dari potensi penjatuhan sanksi dari pihak Amerika Serikat (AS) turut mewarnai perbincangan mengenai jet Rafale. Namun meski negara AS menerapkan Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions* (CAATSA) atau UU yang menjatuhkan sanksi kepada negara yang bertindak 'melawan' AS sejak tahun 2018, Indonesia beserta dua negara Asia lain mendapat jaminan bebas dari sanksi walaupun membeli peralatan militer dari Rusia. AS menganggap ketiga negara Asia yaitu India, Vietnam dan Indonesia adalah sekutu strategis Amerika Serikat di Asia.

## IV. KESIMPULAN



Pemilihan pembelian Rafale dari Prancis sudah tepat waktunya didasarkan pada perkembangan lingkungan strategis dan besaran anggaran yang dimiliki. Tidak cukup hanya sebatas itu, namun pemeliharaan, sumber daya manusia yang mampu mengawaki, merawat dan *me-repair*, teknologi yang dimiliki juga harus mengikat. Sehingga alutsista baru ini dapat memenuhi prasyarat sebagai investasi jangka panjang. Indonesia harus memperbanyak kemitraan dengan banyak negara agar mendapatkan peluang untuk meningkatkan kemampuan dengan beragam teknologi (BBC News, 2022).

Keputusan bekerja sama dengan Prancis didasarkan kepada pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Harapan agar Indonesia memiliki posisi tawar dalam konteks politik kawasan dan dapat memberi tekanan kepada negara yang berniat untuk mengancam dan mengganggu wilayah kedaulatan NKRI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, B. (2022). Mengulas Pilihan Menhan Prabowo Beli Pesawat Tempur Dassault Rafale Asal Prancis. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengulas-pilihan-menhan-prabowo-beli-pesawat-tempur-dassault-rafale-asal-prancis.html>.
- [2] Armenia, R. (2014). Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas. CNN Indonesia. <https://app.cnnindonesia.com/>
- [3] Basri, H. (2022). Kerja Sama Pertahanan, Prabowo: 300 Militer Indonesia telah Menyelesaikan Pendidikan di Prancis. KompasTV. <https://www.kompas.tv/article/260332/kerja-sama-pertahanan-prabowo-300-militer-indonesia-telah-menyelesaikan-pendidikan-di-prancis?page=all>
- [4] BBC News. (2022). Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista, apa istimewanya? BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367J>.
- [5] Berry, A. (2022). Indonesia Beli 6 Jet Tempur Rafale dari Prancis. Media Indonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/470573/indonesia-beli-6-jet-tempur-rafale-dari-Prancis>
- [6] Dougherty, J. E., & Robert L. Pfaltzgraff, J. (2008). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Addison Wesley Longman, Inc.
- [7] Firman, T. (2017). Perancis dan Indonesia dalam Lintasan Sejarah. Tirta.Id. <https://tirta.id/perancis-dan-indonesia-dalam-lintasan-sejarah-cj8Z>
- [8] indomiliter. (2014). Pengadaan Alutsista TNI AL, Antara Harapan Dan Kenyataan Indomiliter.Com. <https://www.indomiliter.com/pengadaan-alutsista-tni-al-antara-harapan-dan-kenyataan-1/>
- [9] Kementerian Petahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*.
- [10] M. Herindra. (2022). Why France, Why Rafale. Kompas.Co.Id. <https://www.kompas.id/baca/english/2022/02/16/why-france-why-rafale>
- [11] Sidebang, F. (2022). Ini Pertimbangan Kemenhan Beli Alutsista dari Prancis. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/r7g5uw428/ini-pertimbangan-kemenhan-beli-alutsista-dari-prancis>
- [12] Yuniar, A. (2021). Ingin Industri Pertahanan RI Mandiri, Prabowo Ingatkan Harus Ada Renstra. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4562832/ingin-industri-pertahanan-ri-mandiri-prabowo-ingatkan-harus-ada-renstra>.